



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.KI.09.01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DJKI MENGAJAR TAHUN 2022**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kekayaan intelektual dalam rangka mendorong pembangunan nasional, perlu adanya agen diseminasi kekayaan intelektual yang dapat membangun antusias masyarakat terhadap kekayaan intelektual nasional dan sebagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa tim penyelenggara telah melakukan seleksi agen diseminasi kekayaan intelektual yang disebut Guru Kekayaan Intelektual dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DJKI Mengajar 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Guru Kekayaan Intelektual dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan DJKI Mengajar Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-013.07.1.097102/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DJKI MENGAJAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan susunan Guru Kekayaan Intelektual dalam rangka penyelenggaraan DJKI Mengajar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru Kekayaan Intelektual dalam rangka penyelenggaraan DJKI Mengajar Tahun 2022 bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti pelatihan Guru Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 2. Menjadi agen diseminasi sebagai Guru Kekayaan Intelektual pada kegiatan DJKI Mengajar Tahun 2022;
 3. Secara aktif menggali wawasan tentang kekayaan intelektual baik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun dari isu yang berkembang di masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Guru Kekayaan Intelektual bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
- KEEMPAT : Masa jabatan Guru Kekayaan Intelektual dalam rangka penyelenggaraan DJKI Mengajar selama satu tahun sejak dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Guru Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2022.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-01.KI.09.01 TAHUN 2022
TANGGAL : 02 Agustus 2022

**GURU KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEGIATAN DJKI MENGAJAR TAHUN 2022**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

1. Meurah Budiman;
2. Sasmita;
3. Rakhmat Renaldy;
4. Filianto Akbar;
5. Reza Dwi Yanto;
6. Zulfitri Purnama Putra;
7. Ansharullah;
8. Hermansyah;
9. Syaury Rizka;
10. Idawanti.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara

1. Abdullah Sani;
2. Lamria Fitriani Manalu;
3. Evy Sofia Manurung;
4. Dessy Lora Dearn Damanik;
5. Desniar Damanik;
6. Rina Devina;
7. Soraya Azmi Tarigan;
8. Yan Putra Jalo Situmorang;
9. Nuri Ardayanti;
10. Bram Gun Saulus Lumban Gaol.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

1. Marisa;
2. Fadhli Septrio Abbas;
3. Imelda Milu Kemalasari;
4. Diana Siska;
5. Muhammad Farhan;
6. Cece Ernaz;
7. Arif Endra Susilo;
8. Yuli Marlina;
9. Syamsuriul;
10. Yunifar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau

1. Dewi Sri Wahyuni;
2. Farhan;
3. Arif;
4. Efa Susanti;
5. Rani;
6. Edison Manik;
7. Ani Zamzani;
8. Lusiana Simanjuntak;
9. Eva Lusiana;
10. Ariston Hotman Turnip.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau

1. Tondi Namora;
2. Putri Andini;
3. Siska Sukmawaty;
4. Miftah Farid;
5. Dwi Maya Charlly;
6. Nurmansyah;
7. Anggi Setiawan;
8. Rosdiana Evlin Walewangko;
9. Erik Junata;
10. Nomika Sinaga.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

1. Hanggi Dyah Arini;
2. Fitri Asnita;
3. Rinaldi Wijaya;
4. Anggie Purnasari Corrie;
5. Selvintrin;
6. Nursyiah;
7. Rizky Kurniawan;
8. Evien Elmer;
9. Asnedi;
10. Dian Merdiansyah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

1. Nurahadi;
2. Arif Sumarsono;
3. Yuli Novianty Agus;
4. Sirly Angraini;
5. Nani Rohati;
6. Zurmisniati;
7. Burhanudin;
8. Soleman;
9. Purwantoro;
10. Hara Nova H. Simanjuntak.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung

1. Rika Rizkya;
2. Nurka Lingga Murti;
3. Mardhotillah;
4. Rika Berlianti;
5. Teti Friandari;
6. Drs. Muhammad Zuhri;
7. Muharramah Istnaini Prihatini;
8. Erwin Setiawan;
9. Robi Awaludin;
10. Farid Anfasa.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu

1. Firman Dwipinto Pattopang;
2. Andrey Pramudia;
3. Fajri Alamsah;
4. Radi Meydiansyah;
5. Yulian Haidir;
6. Zabidin;
7. Suriyanti;

8. Pajar Elmi;
9. Nelly Sinarti;
10. Melti Haryani.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung

1. Muhammad Ichsan;
2. Erlangga Hadi Wibowo;
3. Rizki Amalia;
4. Muhamat Ariyanto;
5. Fajar Husein;
6. Defta Fahrur Setiady;
7. Sudihastuti;
8. Riki Triyansyah;
9. Sofian;
10. Firmansyah Berhard.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

1. Sukoco Hendarto;
2. Lestari Sejati Pertiwi;
3. Angga Ali Wardhana;
4. Amri Ridwan Rachman;
5. Tri Puji Rahayu;
6. Mirna Tiurma Alvernia;
7. Ratna Juliana Siagian;
8. Darrle Leonda Arya Wisnu Murti;
9. Elli Sabarijani;
10. Mirda Hirtianingsi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten

1. Binshar Mulyono;
2. Sofiyani Firdaus;
3. Afra Nur Lestari;
4. Edi Wahyono;
5. Kurniawan Adiyasa;
6. Juhaeriah;
7. Puput Meilani;
8. Wuryanti Handayani;
9. Eris Adriyansyah;
10. Padmodian Widiningtiyas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

1. Cecep Wawan Riawan;
2. Budiman Muhammad;
3. Rika Martiana Dewi;
4. Elin Rahayu;
5. Endy Sepkendarsyah;
6. Nindya Noviani;
7. Rian Yuda perkasa;
8. Arni Agustiani;
9. Novita Marsetyasari;
10. Renny Marta;
11. Wilda Hanum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

1. Martha Sari Wandoyo;
2. Dani Anggoro;
3. Arini Alfia Rahmah;
4. Masnur Tiurmaida Monika Malau;
5. Toto Kuncoro;
6. Sri Pandansari;
7. Yoesry Riyardi Umar;
8. Siti Yulianingsih;
9. Moh Kurniawan;
10. Lily Mufidah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta

1. Dwi Murti;
2. Dwi Mediyani;
3. Rudy Susatyo;
4. Y. Toni Ritanto;
5. Tri Ari Astuti;
6. Oda Anie Indrasari;
7. Sri Sulistyowati;
8. R. Misbakhul Munir;
9. Kristina Budiyan;
10. Windy Maya Arleta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur

1. Dianita Hani Putri;
2. Pramita Apriliyani;
3. Ridsyal Rizki Yogaswara;
4. Fajrin Marhaendra Bakti;
5. Didik Prihantoro;
6. Ayu Febriana Rantiningrum;
7. Dina Isnaini;
8. Ike Primadona Widyasoka.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

1. Sigit Pramono;
2. Herry Hermawan;
3. Muhayan;
4. Tri Novianti Wulandari;
5. Sri Ayu Septinawati;
6. Badaruddin;
7. Annasya Pratiwi;
8. Dini Ardianti;
9. Reihan Rizki Pratama;
10. Utin Putri Novi Lestari.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah

1. Herry Permana;
2. Agus Dwi Susanto;
3. F. Agusth Setiawan Panduwinata;
4. Ari Prasetiyo;
5. Kristoni;
6. Vasco Fernando;
7. Sapta Irawan;
8. Deny Dwi Rahmanto;
9. Gani Nugraha.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan

1. Muhammad Harry Nugraha;
2. Muhammad Arie Syabany;
3. Yulli Rachmadani;
4. Dianor;
5. Rusli;
6. Tulus Achir Cahyadi;
7. Farida Ariani;
8. Togi Leonardo Situmorang;
9. Eldy Prasetya Setiawan;
10. Nizar Al Farisy.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur

1. Rima Kumari;
2. Mardiana Nurhayati;
3. Yusuf Padila;
4. Hendar Kristanto;
5. Eka Juraidah;
6. Malik Ibrahim;
7. Noerhana Dewie;
8. Harry Prabowo;
9. Demas Ahmad Hasanuddin;
10. Muhammad Fadhol Tamimy.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara

1. Muhammad Syachrul;
2. Billy Rompas;
3. Rosdiana Felty Siregar;
4. Pesta Parjagal Lumbanbatu;
5. Jhon Lianto Tobiling;
6. Ruth Putri Dinanthy Sormin;
7. Sandy Kristian Mamuaya;
8. Muhammad Fakhrol Rozzy;
9. Mohammad Ikbal Yonas;
10. Christian D. J. Siwu.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah

1. I Nyoman Sukamayasa;
2. Budi Argap Situngkir;
3. Max Wambrauw;
4. Aida Julpha Tangkere;
5. Herlina;
6. Safrudin;
7. Herry Kresnawan;
8. Riny Ernawaty;
9. Naima Tul Jannah;
10. Muhammad Arfiandi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan

1. Puguh Wiyono;
2. Nasruddin;
3. Michael Arnold Pramudito;
4. Serli Randabunga;
5. Devita Ayu Maharani;
6. Erna;
7. Wahyuddin AM;

8. Marini Olivia Pandean;
9. Adly Azhari;
10. Feny Feliana.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara

1. Gusti Sayu Putu Ratna;
2. Cipta Sembiring;
3. Ahmad Syahrir;
4. Isnariyati;
5. Karmi;
6. Masriani;
7. Ida Ayu Swi Dewi Kusuma;
8. Zulfaida;
9. Syahrin Mubarak;
10. Nurman Safarno.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo

1. Roni Habibie
2. Ramlan Harun
3. Martvina Sapii
4. Ira Pakaya
5. Moh. Zaki Faisal
6. Mursid Mangati
7. Rut Swarny Sartama Saragih
8. Julyadi Angjaya
9. Ahmad Kilo

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat

1. Annasrawati. A;
2. Ramli R;
3. Abdullah;
4. Muhammad Aldi Wiratama;
5. Juani;
6. Luberti Toding;
7. Iswahyudi Kusuma Negara Munir;
8. Zeni Rukmansah;
9. Astuti Toding;
10. Achmad Fauzie Azis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali

1. Rijal;
2. Made Prama Dyanti Kusumasinda;
3. Abi Anas;
4. Dewa Ayu Anom Karismayani;
5. Ratih Rosmayuani;
6. Ida Ayu Herawati;
7. Putu Sumiasi;
8. I Gede Prima Praja Sarjana;
9. I Gede Adi Saputra;
10. I Ketut Dudi Wiguna.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur

1. Brian Jati Purbaningtyas;
2. Cornelia Yasintha Radho;
3. Gasper Melkisedek Kese;
4. Lesry Mindrom Nastemty Dite;

5. Muhamad Ramlan;
6. I Gusti Ngurah Oka Endrawan;
7. Nikolas Tak;
8. Yudhi Prasetyo;
9. Dra. Dientje E. Bule Logo;
10. Hemy J. W. Poyk.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat

1. Indraswati;
2. Linda Maya Sastra;
3. Ni Made Arie Satyani;
4. Samdani;
5. Hermanto;
6. Rusmiati;
7. Regina Wiwin Sriwindarti;
8. I Dewa Made Dwi Prasetya Utama;
9. Nurul Fatima;
10. Supardi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

1. Amelia Inggiryani;
2. Adry M Matulesy;
3. Christifidelis Giovanni Leiwakabessy;
4. Halawalaya Talaohu;
5. Zarkasih Latuconsina;
6. Fida Elvi Anderia Sebayang;
7. Thortjie Maria Mataheru;
8. Kardin Laucu;
9. Zulkipli Salampessy;
10. Muhammad Idrus Nurbaty.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara

1. Suhaemi Junaedi;
2. Teguh Firmanto;
3. Anita Safitri;
4. Nuryanti;
5. Hasbi Ibrahim;
6. Zunaidi Yasin;
7. Diah Dwi Paramita;
8. Naomi Nguru;
9. Febry Wulan;
10. Erni Rumasoreng.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua

1. Anthonius M. Ayorbaba;
2. Rionard;
3. Dwi Agus Prasetyo;
4. Elizabeth S.A Haurissa;
5. Ardi C. Yepese;
6. Yakobus Mebri;
7. Agustina I.R Pulalo;
8. Nus Gobay;
9. Nur Tsabat Silas Enoch;
10. Melany Lumme.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat

1. Anang Prestawan;
2. Irfan Fitriadi;
3. Deyarma James;
4. Moch Nur Habibi;
5. Christian Utama Putra;
6. Indra Ajiarta;
7. Ardhi Kusuma;
8. Agus Febrianto;
9. Khoirun Nisak;
10. Jeffa Maulina Dayu P.

Unit Pusat

1. Muh.Fandhi Fanani;
2. Sabar;
3. Elizabeth Adriana;
4. Dwi Satria Wijanarko;
5. Lisa Noviana;
6. Alih Usman;
7. Abdul Rozak;
8. Sri Kurniati Handayani Pane;
9. Eka Yanuarti;
10. Sari Sulistiawati Suwardi;
11. Mulyawandari;
12. Muhamad Jajuli;
13. Sudaryadi;
14. Sopi Ahyar;
15. Junita Asni Siagian;
16. Ruslinda Dwi Wahyuni;
17. Nurul Pertiwi;
18. Ayu Wikha Noviyana;
19. Syaifullah Hsp.



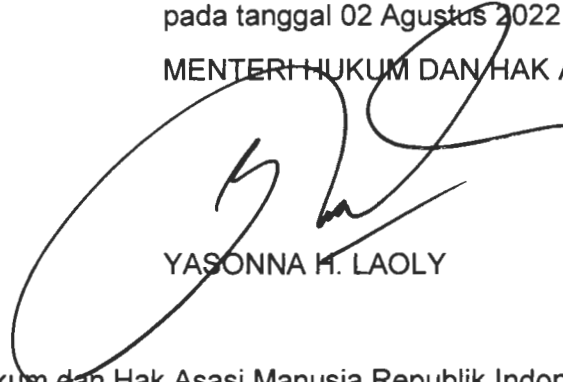
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Agustus 2022

MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat

1. Anang Prestawan;
2. Irfan Fitriadi;
3. Deyarma James;
4. Moch Nur Habibi;
5. Christian Utama Putra;
6. Indra Ajiarta;
7. Ardhi Kusuma;
8. Agus Febrianto;
9. Khoirun Nisak;
10. Jeffa Maulina Dayu P.

Unit Pusat

1. Muh.Fandhi Fanani;
2. Sabar;
3. Elizabeth Adriana;
4. Dwi Satria Wijanarko;
5. Lisa Noviana;
6. Alih Usman;
7. Abdul Rozak;
8. Sri Kurniati Handayani Pane;
9. Eka Yanuarti;
10. Sari Sulistiawati Suwardi;
11. Mulyawandari;
12. Muhamad Jajuli;
13. Sudaryadi;
14. Sopi Ahyar;
15. Junita Asni Siagian;
16. Ruslinda Dwi Wahyuni;
17. Nurul Pertiwi;
18. Ayu Wikha Noviyana;
19. Syaifullah Hsp.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY